



Mobilisasi Identitas Keagamaan Dalam Gerakan Penolakan Kandang Ayam di Cibetus Padarincang

Ahmad Alimun Ali Musa Firdaus¹, Ferry Fernando², Ahmad Beny Avicenna³,
Mahpudin^{4*}

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Corresponding author email: mahpudin.ip@untirta.ac.id

Abstract. This study aims to analyze how religious identity is reconstructed and mobilized by activists in the movement opposing the construction of a large-scale chicken farm in Cibetus Village, Padarincang, Serang, Banten, and to explain the role of religion as a moral framework, a symbolic resource, and a political language in environmental conflicts at the local level. This study employs a qualitative approach using phenomenological methods to capture the lived experiences and subjective interpretations of activists directly involved in supporting residents affected by environmental pollution, health threats, and criminalization. Data were collected through in-depth interviews with activists from various organizations, observations of religious practices and protest actions, as well as analysis of movement documents and media coverage. The research findings indicate that religious identity is not the initial trigger for resistance, but becomes increasingly central as the conflict escalates and formal political and legal channels—perceived as unresponsive to citizens’ grievances—are closed off. Religious practices such as religious study sessions, istighosah, communal prayer, and sermons serve as spaces for moral reflection and social consolidation, enabling activists to reframe environmental and health issues as narratives of moral injustice, religious duty, and collective responsibility to safeguard God’s creation. Through this process, religion provides moral legitimacy for resistance, strengthens collective solidarity, and establishes a clear antagonistic boundary between “us”—as a community of believers fighting for life, health, and the environment—and “them”—as the state and corporations associated with capital-oriented development logic. This study affirms that religious identity is a dynamic and contingent discursive resource in the mobilization of social movements, while simultaneously challenging the dominant development discourse in the context of contemporary Indonesia.

Keywords: Mobilization of Religious Identity; Social Movements; Environmental Conflict

Pendahuluan

Politik identitas tetap menjadi arena penting untuk menegosiasikan kekuasaan termasuk melalui identitas agama (Aspinall & Berenschot, 2019; Castells, 1997; Fox, 2018; Hadiz, 2016; Mietzner & Muhtadi, 2018). Dalam konteks tersebut, identitas

keagamaan tidak hanya hadir sebagai ekspresi keyakinan personal, tetapi juga mengalami proses politisasi ketika dimasukkan ke dalam dinamika konflik dan perlawanan sosial (Castells, 1997; Fox, 2018). Agama menyediakan kerangka moral, bahasa simbolik, serta jaringan sosial yang efektif untuk mengorganisasi massa, membingkai ketidakadilan, dan melegitimasi tindakan kolektif terhadap kebijakan atau proyek pembangunan yang dianggap merugikan masyarakat (Hadiz, 2016; Tilly, 2004). Mobilisasi identitas keagamaan dalam gerakan sosial kerap menjadi medium strategis bagi aktor-aktor lokal untuk menegosiasikan relasi kuasa dengan negara maupun pemodal, sekaligus menegaskan klaim atas ruang, sumber daya, dan otoritas moral di tingkat lokal (Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner & Muhtadi, 2018).

Demokrasi pascareformasi di Indonesia membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu implikasi penting dari keterbukaan tersebut adalah meningkatnya peran masyarakat sipil dalam mengekspresikan kepentingan kolektif, termasuk dalam bentuk gerakan sosial. Gerakan sosial tidak lagi terbatas pada isu ketenagakerjaan atau politik elektoral, tetapi juga merambah pada isu lingkungan, ruang hidup, dan keadilan sosial (Aspinall, 2011; Tarrow, 2011). Dalam konteks Indonesia, gerakan sosial seringkali tidak dapat dilepaskan dari faktor identitas, terutama identitas keagamaan. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan spiritual, tetapi juga sebagai sumber nilai, simbol, dan legitimasi dalam mengorganisasi perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan publik yang dianggap tidak adil (Hefner, 2011; Madjid, 2008). Mobilisasi identitas keagamaan menjadi fenomena yang semakin menonjol, terutama dalam konflik-konflik lokal yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan hidup, dan investasi.

Mobilisasi identitas keagamaan merujuk pada proses penggunaan simbol, nilai, tokoh, dan institusi keagamaan sebagai alat untuk menggerakkan dukungan kolektif dalam suatu gerakan sosial (Castells, 2010; Snow & Benford, 1988). Dalam masyarakat dengan tingkat religiositas yang tinggi, agama memiliki daya ikat sosial yang kuat dan mampu membangun solidaritas lintas individu secara efektif. Hal ini menjadikan agama sebagai sumber daya strategis dalam membingkai isu-isu sosial, termasuk isu lingkungan, sebagai persoalan moral dan tanggung jawab spiritual. Fenomena tersebut juga terlihat dalam berbagai konflik pembangunan di wilayah pedesaan. Masuknya proyek-proyek investasi skala besar, seperti industri peternakan, pertambangan, dan perkebunan, kerap memicu resistensi masyarakat lokal akibat dampak lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi tradisional (Bebbington et al., 2018; Li, 2012). Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya menggunakan argumen teknis-ekologis, tetapi juga memanfaatkan narasi keagamaan sebagai legitimasi perjuangan.

Salah satu contoh konkret adalah penolakan pembangunan kandang ayam skala besar di Desa Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Proyek

peternakan ayam tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan sumber mata air, serta gangguan kesehatan akibat limbah peternakan. Namun yang menarik, gerakan penolakan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada argumen lingkungan, melainkan juga dipadukan dengan narasi keagamaan yang menempatkan perlawanan sebagai bagian dari kewajiban moral menjaga amanah Tuhan terhadap alam. Dalam konteks sosial masyarakat Padarincang yang religius, peran tokoh agama seperti kiai, ustaz, serta institusi pesantren menjadi sangat penting dalam membentuk orientasi gerakan. Otoritas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai opinion leader yang mampu meringkai isu pembangunan dalam perspektif dosa, pahala, keadilan, dan kemaslahatan umat (Burhani, 2017; Hefner, 2011).

Gerakan penolakan kandang ayam di Desa Cibetus tidak dapat dipahami semata sebagai konflik lingkungan, tetapi juga sebagai ekspresi politik identitas berbasis agama. Selain itu, gerakan ini juga mencerminkan dinamika relasi kekuasaan antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan aktor korporasi. Pemerintah daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, cenderung membuka ruang bagi investasi sektor peternakan. Namun di sisi lain, masyarakat memandang kebijakan tersebut belum sepenuhnya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai sosial-keagamaan yang hidup di tengah masyarakat (Dwiyanto, 2011; Fauzi, 2010).

Berdasarkan catatan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan WALHI, sekitar 200 warga mengalami gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) per Desember 2024 akibat pencemaran udara dari blower kandang ayam, sementara sumber air bersih di desa tersebut juga terkontaminasi limbah, membuat warga harus membeli air galon untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sebanyak 11 warga ditangkap dan ditahan atas dugaan pembakaran kandang ayam pada Februari 2025, menunjukkan eskalasi konflik dan kriminalisasi terhadap warga yang berjuang atas hak lingkungan dan kesehatan mereka. Data-data ini menegaskan bahwa konflik di Padarincang bukan sekadar persoalan lokal, tetapi merupakan representasi dari ketegangan struktural antara kepentingan korporasi, pemerintah, dan masyarakat yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan, sehingga penelitian terhadap mobilisasi identitas keagamaan dalam gerakan penolakan ini sangat mendesak untuk dipahami secara komprehensif.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana aktivis merekonstruksi dan memaknai identitas keagamaan dalam proses mobilisasi gerakan penolakan pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Fokus ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam proses serta makna mobilisasi identitas keagamaan dalam konteks gerakan sosial di tingkat lokal, khususnya ketika agama tidak hanya

berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual, tetapi juga sebagai sumber daya simbolik dalam membangun legitimasi, solidaritas, dan kekuatan kolektif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu pemerintahan, sosiologi politik, dan studi gerakan sosial, terutama dalam memahami relasi antara agama, politik identitas, dan konflik pembangunan di tingkat lokal. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat, serta menjadi referensi bagi aktivis lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan strategi advokasi berbasis pendekatan sosial-religius guna mengelola dan merespons konflik pembangunan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketegangan antara logika pembangunan ekonomi dan logika keberlanjutan ekologis serta religiusitas masyarakat inilah yang kemudian melahirkan gerakan sosial berbasis identitas keagamaan. Gerakan ini tidak hanya menjadi sarana resistensi, tetapi juga medium artikulasi kepentingan politik masyarakat desa dalam memperjuangkan ruang hidup yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana proses mobilisasi dan makna identitas keagamaan terjadi dalam gerakan penolakan kandang ayam yang dilakukan oleh aktivis dari berbagai organisasi di Desa Cibetus, Padarincang. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran agama dalam dinamika gerakan sosial lokal, khususnya dalam konteks konflik pembangunan di wilayah pedesaan.

Metode Penelitian

Bagian Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini karena dinilai paling relevan untuk menggali dan memahami pengalaman subjektif para aktor gerakan sosial yang terlibat langsung dalam proses advokasi penolakan pembangunan kandang ayam di Cibetus, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Fenomenologi berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial dibentuk melalui pengalaman sadar individu, sehingga pemahaman terhadap suatu fenomena sosial tidak dapat dilepaskan dari cara subjek memaknai pengalaman hidupnya (*lived experiences*) (Creswell, 2013). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri secara mendalam bagaimana para aktivis memaknai peran mereka dalam mendampingi warga, memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta berhadapan dengan relasi kuasa yang timpang antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aktor korporasi.

Dalam konteks gerakan penolakan kandang ayam di Cibetus, pengalaman advokasi yang dialami oleh para aktivis tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, administratif, atau regulatif. Para aktivis memaknai persoalan pencemaran udara,

kerusakan sumber mata air, serta ancaman kesehatan akibat aktivitas peternakan ayam sebagai persoalan yang memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Kerusakan lingkungan dipersepsikan sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus sebagai wujud ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat lokal. Fenomenologi memberikan ruang analitis untuk menangkap kedalaman makna tersebut, yang sering kali tidak dapat dijelaskan secara komprehensif melalui pendekatan kuantitatif atau positivistik (Creswell, 2013).

Pendekatan fenomenologi juga relevan karena penelitian ini menempatkan aktivis sebagai subjek utama dalam proses mobilisasi dan mengadvokasi masyarakat Cibetus yang memiliki identitas kuat pada identitas keagamaan. Dalam pengalaman para aktivis, agama tidak hanya hadir sebagai keyakinan personal, tetapi berfungsi sebagai kerangka nilai, simbol, dan bahasa moral yang digunakan untuk membingkai konflik pembangunan. Nilai-nilai keagamaan dimobilisasi untuk menafsirkan konflik lingkungan sebagai persoalan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kewajiban kolektif untuk menjaga kelestarian alam. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti dapat memahami bagaimana pengalaman advokasi tersebut membentuk kesadaran religius-politik para aktivis dan penggunaan identitas keagamaan sebagai dasar legitimasi gerakan sosial (Mayrudin et al., 2020)

Selain itu, menurut (Creswell, 2013) fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman para aktivis dalam menghadapi berbagai bentuk tekanan struktural, seperti terbatasnya ruang partisipasi publik, marginalisasi suara warga, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak proyek pembangunan. Pengalaman-pengalaman tersebut tidak semata-mata dipersepsi sebagai persoalan hukum atau politik, melainkan ditafsirkan sebagai bentuk ketidakadilan moral yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan prinsip keadilan sosial. Dengan menempatkan pengalaman subjektif sebagai pusat analisis, fenomenologi membantu mengungkap bagaimana kondisi antagonistik tersebut membentuk narasi perlawanan, memperkuat solidaritas kolektif, dan memperdalam komitmen moral para aktivis terhadap perjuangan lingkungan.

Lebih jauh, penggunaan metode fenomenologi berkontribusi pada pemahaman mengenai proses pembentukan makna dan identitas kolektif dalam gerakan penolakan kandang ayam di Cibetus. Melalui penggalian pengalaman subjektif para aktivis, penelitian ini dapat menyingkap bagaimana isu lingkungan, ketimpangan relasi kuasa, serta nilai-nilai keagamaan dirangkai ke dalam satu kesatuan makna yang koheren dan mampu menggerakkan masyarakat secara kolektif. Sebagaimana ditegaskan oleh Creswell (2013), tujuan utama fenomenologi bukan hanya mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga mengungkap esensi dari pengalaman tersebut, yakni makna terdalam yang membentuk cara subjek memahami realitas sosialnya. Oleh karena itu,

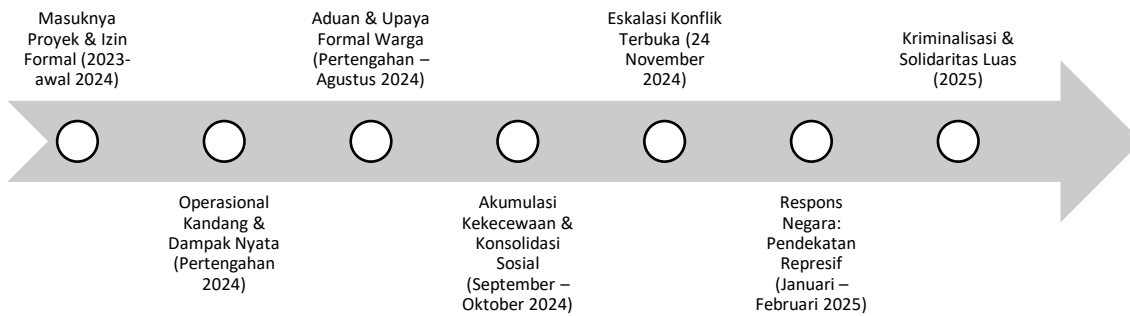
pendekatan fenomenologi menjadi metode yang strategis untuk mengkaji mobilisasi identitas keagamaan dalam konflik pembangunan yang sarat dengan dimensi sosial, politik, dan moral.

Pendekatan fenomenologi dipandang relevan karena memungkinkan peneliti menggali dan memahami pengalaman subjektif aktor gerakan dalam mendampingi warga, mengadvokasi hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta menghadapi relasi kuasa yang timpang antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aktor korporasi. Dalam pengalaman para aktivis, persoalan pencemaran lingkungan dan ancaman kesehatan akibat peternakan ayam tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis atau administratif, melainkan ditafsirkan sebagai problem moral dan spiritual yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan amanah keagamaan. Oleh karena itu, metode fenomenologi bermanfaat untuk mengungkap makna terdalam dari pengalaman advokasi dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk kesadaran religius-politik para aktivis (Mayrudin et al., 2020).

Hasil dan Diskusi

A. Dinamika Konflik

Bagian Konflik pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus merupakan konflik yang berkembang secara bertahap dan eskalatif, dimulai dari persoalan teknis perizinan dan dampak lingkungan, kemudian bertransformasi menjadi konflik sosial-politik yang melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat. Dilansir dari (BantenInside, 2024; Kompas.com, 2025) dinamika konflik ini hanya dapat dipahami secara utuh apabila ditelusuri melalui kronologi kejadian, posisi kepentingan para aktor, basis material konflik, serta konteks sosial-keagamaan yang membentuk pola perlawanan warga. Masuknya proyek kandang ayam skala besar di Desa Cibetus dimulai pada fase perizinan yang berlangsung secara administratif sebelum operasional berjalan. Sekitar tahun 2023-awal 2024, perusahaan peternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) telah mengantongi dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Secara formal, proyek ini diposisikan sebagai bagian dari agenda investasi dan pembangunan daerah (BantenInside, 2024). Namun, berdasarkan kronologi yang didokumentasikan oleh warga dan disebarluaskan melalui kanal gerakan Padarincang Melawan, proses perizinan tersebut tidak melibatkan masyarakat secara bermakna. Warga mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai skala produksi, jarak kandang dengan permukiman, serta potensi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Berikut alur kronologinya:



Gambar 1. Alur Kronologi
 Sumber : Diolah oleh Penulis

Memasuki pertengahan 2024, setelah kandang ayam mulai beroperasi penuh, warga mulai merasakan dampak nyata. Bau menyengat, meningkatnya lalat, serta dugaan pencemaran air menjadi keluhan utama masyarakat. Aduan warga disampaikan berulang kali kepada pemerintah desa dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Meskipun pada beberapa kesempatan dilakukan pengecekan lapangan dan dikeluarkan teguran administratif, warga tidak melihat adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan limbah di lapangan (Wawancara DLHK, 2025). Situasi ini memunculkan kekecewaan kolektif. Pada September-Oktober 2024, warga mulai melakukan aksi-aksi protes terbuka, audiensi, serta pertemuan bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ketika upaya tersebut tidak menghasilkan solusi konkret, konflik memasuki fase eskalasi (BantenRaya, 2024). Puncak konflik terjadi pada 24 November 2024, ketika aksi penolakan warga berujung pada pembakaran fasilitas kandang ayam. Peristiwa ini menjadi titik balik konflik karena setelah itu pendekatan negara berubah dari mediasi menjadi penegakan hukum. Pada Januari–Februari 2025, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah warga yang dituduh terlibat dalam pembakaran, termasuk santri dan tokoh lokal. Sejak saat itu, konflik Cibetus tidak lagi semata konflik lingkungan, tetapi telah memasuki ranah kriminalisasi dan konflik politik terbuka (Kompas.com, 2025; SuaraBanten.id, 2025).

Dalam konflik ini, masyarakat Desa Cibetus menempati posisi sebagai pihak yang paling terdampak secara langsung. Kepentingan utama warga adalah mempertahankan kualitas lingkungan, kesehatan, dan ruang hidup. Bagi warga, keberadaan kandang ayam bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan ancaman terhadap kehidupan sehari-hari (Wawancara Warga Cibetus, 2024). Aktivis dan jaringan masyarakat sipil hadir sebagai aktor pendamping sejak pertengahan 2024. Mereka berperan dalam mendokumentasikan dampak lingkungan, mengorganisir aksi, serta memperluas isu Cibetus ke ruang publik melalui media sosial dan advokasi hukum, termasuk gugatan izin lingkungan ke PTUN (BantenInside, 2024). Pemerintah daerah berada dalam posisi

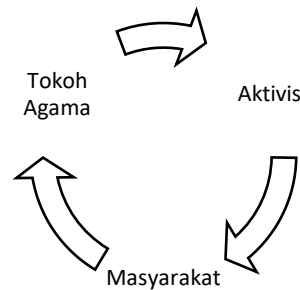
yang ambigu. Di satu sisi, pemerintah memiliki mandat pengawasan lingkungan. Di sisi lain, pemerintah juga berkepentingan menjaga iklim investasi. Ketegangan kepentingan ini memunculkan persepsi di kalangan warga bahwa pemerintah lebih berpihak pada korporasi, terutama setelah konflik berujung pada tindakan represif terhadap warga (Wawancara DLHK, 2025). Korporasi sebagai pengelola kandang ayam memosisikan diri sebagai pihak yang sah secara hukum karena telah mengantongi izin. Namun, kegagalan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan secara efektif justru memperkuat resistensi warga dan memperdalam konflik sosial (BantenRaya, 2024).

Basis material konflik pembangunan kandang ayam di Cibetus terletak pada dampak lingkungan dan kesehatan yang dialami warga sejak pertengahan 2024. Bau limbah yang menyengat, penurunan kualitas air, serta keluhan gangguan pernapasan menjadi pengalaman konkret masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Wawancara Warga Cibetus, 2024). Pengalaman penderitaan material inilah yang menjadi fondasi kesadaran kolektif warga. Ketika ruang hidup terganggu secara terus-menerus, persoalan pembangunan tidak lagi dipahami sebagai isu teknis, melainkan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang harus dilawan. Desa Cibetus dan Padarincang yang memiliki basis religius kuat, eskalasi konflik sejak September 2024 menjadi konteks awal politisasi identitas keagamaan. Pengajian, istighosah, dan doa bersama yang semula merupakan praktik keagamaan rutin berubah menjadi ruang konsolidasi sosial dan politik. Melalui narasi keagamaan, penderitaan akibat bau, limbah, dan kriminalisasi dimaknai sebagai bentuk kezaliman. Perlawanan warga dipahami sebagai kewajiban moral untuk menjaga amanah Tuhan atas alam dan kehidupan. Dengan demikian, identitas keagamaan tidak menjadi pemicu awal konflik, melainkan menjadi instrumen artikulasi dan legitimasi moral setelah konflik pembangunan mencapai titik krisis.

B. Struktur Aktor dan Jaringan Gerakan

Gerakan penolakan pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus tidak tumbuh secara spontan, melainkan melalui proses interaksi antara berbagai aktor yang memiliki peran dan modal sosial berbeda. Struktur aktor dalam gerakan ini mencakup warga terdampak, aktivis pendamping, serta tokoh agama. Hubungan antartetiga aktor tersebut membentuk jaringan gerakan yang memungkinkan pengalaman individual warga ditransformasikan menjadi perlawanan kolektif yang terorganisir. Aktivis, tokoh agama, dan warga memiliki fungsi berbeda, namun saling melengkapi dalam membangun solidaritas dan keberlanjutan gerakan. Aktivis berperan sebagai aktor kunci dalam mengorganisasi perlawanan kolektif warga Cibetus. Berdasarkan transkrip wawancara, Tomira (GMNI) menjelaskan bahwa pada tahap awal konflik, keluhan warga masih bersifat tersebar dan belum dipahami sebagai persoalan struktural. Aktivis kemudian membantu menyatukan pengalaman tersebut ke dalam satu narasi bersama. *“Awalnya warga mengeluh soal bau limbah kandang ayam yang mengganggu*

kesehatan.” (Tomira, GMNI, wawancara 2025). Aktivist membantu menyediakan ruang diskusi, menghubungkan warga dengan jaringan yang lebih luas, serta mengartikulasikan persoalan lokal ke dalam bahasa advokasi dan hak. Pendekatan aktivis yang menekankan pendengaran dan keterlibatan langsung warga menunjukkan praktik grassroots organizing. Hal ini penting karena memperkuat rasa kepemilikan gerakan di kalangan warga dan mencegah delegitimasi gerakan sebagai agenda pihak luar.



Gambar 2 Relasi Aktivist, Masyarakat dan Tokoh Agama
Sumber: Diolah oleh Penulis

Selain aktivis, tokoh agama memegang peran strategis sebagai sumber otoritas moral. Dalam masyarakat Padarincang yang religius, legitimasi tindakan kolektif tidak cukup hanya didasarkan pada argumen teknis lingkungan. Ia membutuhkan pembenaran moral yang diakui secara sosial. Muhammad Fikri (HMI) menegaskan bahwa kegiatan keagamaan menjadi medium penting dalam membangun keberanian dan solidaritas warga: *“Kegiatan seperti pengajian dan istighosah itu memperkuat solidaritas.”* (Muhammad Fikri, HMI, wawancara 2025). Tokoh agama tidak hanya menguatkan aspek spiritual, tetapi juga membantu meringkai konflik sebagai persoalan keadilan dan kezaliman, bukan sekadar sengketa pembangunan. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai sumber daya simbolik yang memperkuat klaim moral warga atas ruang hidup mereka.

Relasi antara aktivis, warga, dan tokoh agama bersifat horizontal dan berbasis kepercayaan. Tidak terdapat struktur kepemimpinan tunggal yang dominan. Yoga (UMC) menjelaskan bahwa agama menjadi titik temu yang menyatukan warga dari latar belakang berbeda. *“Identitas bersama terbentuk karena agama menjadi titik temu warga.”* (Yoga, UMC, wawancara 2025). Kegiatan keagamaan berfungsi sebagai ruang sosial di mana identitas “kami” sebagai warga yang terdampak dan memiliki tanggung jawab moral menjaga lingkungan diproduksi dan direproduksi. Relasi ini memperlihatkan bahwa aktivis tidak menggantikan peran tokoh agama atau warga, melainkan memperkuat jaringan di antara mereka. Hal ini membuat gerakan memiliki daya tahan sosial yang lebih kuat, terutama ketika konflik memasuki fase represif.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah fungsi aktivis sebagai mediator antara pengalaman konkret warga dan artikulasi wacana di ruang publik. Habibi Al-Fatin (LPM Orange) menekankan bahwa ritual keagamaan memberi dasar moral bagi perjuangan warga. *“Ritual keagamaan memberi dasar moral bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan pribadi.”* (Habibi Al-Fatin, LPM Orange, wawancara 2025). Proses ini memungkinkan isu Cibetus tidak terjebak sebagai masalah lokal, tetapi dipahami sebagai bagian dari persoalan keadilan lingkungan dan hak warga negara. Dengan demikian, struktur aktor dan jaringan gerakan penolakan di Desa Cibetus menunjukkan bahwa keberhasilan mobilisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya dampak lingkungan, tetapi juga oleh kemampuan aktor-aktor gerakan dalam membangun solidaritas, legitimasi moral, dan artikulasi wacana. Aktivis, tokoh agama, dan warga membentuk relasi yang memungkinkan konflik pembangunan bertransformasi menjadi gerakan sosial dengan basis material, simbolik, dan religius yang saling terhubung.

C. Praktik Mobilisasi Identitas Keagamaan

Praktik mobilisasi identitas keagamaan dalam gerakan penolakan pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus berkembang seiring dengan eskalasi konflik pembangunan. Identitas keagamaan tidak muncul sebagai faktor pemicu awal, melainkan sebagai sarana artikulasi moral dan konsolidasi sosial setelah warga mengalami dampak lingkungan dan kesehatan yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai sumber daya simbolik yang memungkinkan warga membingkai penderitaan material mereka ke dalam narasi yang bermakna dan sah secara sosial. Dari hasil wawancara berikut perspektif dari aktivis yang berbeda background organisasi tapi terjun langsung ketitik aksi:

Tabel 1 Pernyataan Penting Mengenai Mobilisasi Identitas Keagamaan

| Informan | Kutipan Langsung |
|------------------------------|---|
| Tomira (GMNI) | “Kegiatan keagamaan itu yang paling dekat dengan kehidupan warga. Dari situ warga berkumpul, ngobrol, dan saling menguatkan.” |
| Yoga (UMC) | “Agama dipakai untuk menjelaskan bahwa menjaga lingkungan itu bagian dari amanah manusia.” |
| Habibi Al-Fatin (LPM Orange) | “Ritual keagamaan memberi dasar moral bahwa perjuangan ini bukan sekadar kepentingan pribadi, tapi soal keadilan.” |
| Muhammad Fikri (HMI) | “Agama itu menyatukan warga, terlepas dari latar belakang. Dari situ muncul keberanian bersama.” |

Sumber: Diolah oleh Penulis

Kegiatan keagamaan seperti istighosah, doa bersama, dan pengajian berfungsi sebagai ruang konsolidasi utama warga. Kegiatan ini memungkinkan warga berkumpul secara rutin dalam suasana yang relatif aman dan legitim, tanpa harus secara terbuka menyatakan diri sedang melakukan mobilisasi politik. Dalam wawancara, Tomira (GMNI) menjelaskan bahwa ruang keagamaan menjadi medium awal penguatan

solidaritas. Melalui ruang tersebut, warga mulai menyadari bahwa keluhan yang mereka alami bukan persoalan pribadi, melainkan persoalan bersama.

Selain sebagai ruang konsolidasi, agama juga digunakan sebagai bahasa untuk membingkai konflik pembangunan kandang ayam. Dampak lingkungan seperti bau limbah dan pencemaran air tidak hanya dipahami sebagai gangguan teknis, tetapi dimaknai sebagai persoalan moral dan keadilan. Hal ini dijelaskan oleh Yoga (UMC) yang melihat bahwa narasi keagamaan membantu warga memahami posisi mereka dalam konflik. Framing keagamaan membuat konflik lebih mudah dipahami dan diterima, sekaligus memberikan pembenaran normatif terhadap tindakan penolakan. Agama juga berfungsi sebagai sumber legitimasi moral yang memungkinkan warga membenarkan perlawanan mereka terhadap negara dan korporasi. Ketika mekanisme formal seperti perizinan dan pengawasan lingkungan dianggap tidak berpihak, warga mencari rujukan etis lain untuk menilai benar dan salah. Habibi Al-Fatin (LPM Orange) menegaskan bahwa ritual keagamaan memberikan dasar moral bagi gerakan. Legitimasi moral ini penting untuk menjaga kohesi internal gerakan, terutama ketika konflik memasuki fase represif dan sebagian warga mengalami kriminalisasi.

Selain legitimasi, praktik keagamaan juga menghasilkan energi mobilisasi. Kebersamaan dalam doa dan pengajian menumbuhkan keberanian kolektif warga untuk bersikap terbuka dan bertahan menghadapi tekanan. Dalam wawancara, Muhammad Fikri (HMI) menekankan fungsi pemersatu agama. Mobilisasi agama juga memiliki dimensi strategis, karena narasi keagamaan relatif sulit untuk didelegitimasi secara politik dan memberikan ruang aman bagi ekspresi perlawanan. Dengan demikian, praktik mobilisasi identitas keagamaan dalam gerakan penolakan kandang ayam di Desa Cibetus menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai ruang konsolidasi, alat framing konflik, sumber legitimasi moral, sekaligus energi mobilisasi kolektif. Kutipan langsung dari para informan memperlihatkan bahwa agama tidak digunakan secara instrumental semata, tetapi berakar pada pengalaman sosial dan kultural warga. Praktik ini menegaskan bahwa gerakan sosial di konteks lokal tidak dapat dipahami hanya melalui kepentingan material, tetapi juga melalui dimensi moral dan simbolik yang memberi makna pada perlawanan warga.

D. Rekonstruksi dan Pemaknaan Identitas Keagamaan oleh Aktivis

Dalam dinamika gerakan penolakan pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus, agama tidak hadir sebagai doktrin yang statis, melainkan direkonstruksi dan dimaknai ulang oleh aktivis sebagai kerangka etika untuk menilai praktik pembangunan (Asad, 1993; Mahmood, 2005). Aktivis memposisikan agama sebagai sumber nilai yang memungkinkan warga melakukan penilaian moral terhadap proyek kandang ayam, khususnya terkait dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Pembangunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses

ekonomi atau kebijakan teknokratis, tetapi sebagai tindakan yang harus diuji secara etis melalui nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Bayat, 2013; Smith, 2010).

Sejalan dengan itu, aktivis berperan penting dalam mentransformasikan isu lingkungan menjadi isu moral dan religius. Dampak pencemaran tidak hanya dijelaskan dalam bahasa teknis atau ilmiah, tetapi dirangkai dalam narasi keagamaan tentang dosa, tanggung jawab manusia, dan kewajiban menjaga ciptaan Tuhan (Fairclough, 2003; Hirschkind, 2001). Proses ini membuat isu lingkungan menjadi lebih dekat dengan pengalaman spiritual warga dan mudah diterima dalam kerangka pemahaman sehari-hari. Kerusakan lingkungan diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah agama, sementara perlawanan terhadapnya dimaknai sebagai ibadah dan perjuangan moral (Smith & Maarif, 2024).

Sejalan dengan itu, aktivis berperan penting dalam mentransformasikan isu lingkungan menjadi isu moral dan religius. Dampak pencemaran tidak hanya dijelaskan dalam bahasa teknis atau ilmiah, tetapi dirangkai dalam narasi keagamaan tentang dosa, tanggung jawab manusia, dan kewajiban menjaga ciptaan Tuhan. Proses ini membuat isu lingkungan menjadi lebih dekat dengan pengalaman spiritual warga dan mudah diterima dalam kerangka pemahaman sehari-hari. Kerusakan lingkungan diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap perintah agama, sementara perlawanan terhadapnya dimaknai sebagai ibadah dan perjuangan moral.

Transformasi ini juga memungkinkan berbagai keluhan warga mulai dari bau limbah, gangguan kesehatan, hingga rasa ketidakadilan terhubung dalam satu rangkaian makna religius. Isu-isu yang sebelumnya terfragmentasi disatukan dalam narasi bahwa pembangunan kandang ayam bukan hanya merugikan secara material, tetapi juga mencederai nilai-nilai keimanan dan tatanan sosial lokal (Glynos & Howarth, 2007; Laclau & Mouffe, 1985). Dengan cara ini, agama menjadi medium artikulasi yang efektif untuk menyatukan pengalaman sosial, ekologis, dan spiritual warga ke dalam satu tuntutan kolektif (Torfing, 1999).

Tabel 2 Rekonstruksi Pemaknaan Identitas Keagamaan

| Pemaknaan Identitas Keagamaan oleh Aktivis | Rekonstruksi Makna |
|---|---|
| Sumber Kesadaran Moral dan Politik | Dalam gerakan penolakan pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus, aktivis memaknai agama tidak hanya sebagai praktik ibadah individual, tetapi sebagai kerangka etis untuk membaca ketidakadilan struktural yang dialami warga. Melalui pengajian, istighosah, dan doa bersama, pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan dimaknai sebagai bentuk kezaliman terhadap hak hidup dan martabat manusia, bukan sekadar persoalan teknis pembangunan. Aktivis berperan menghubungkan ajaran keadilan, amanah, dan tanggung jawab manusia terhadap alam dengan pengalaman konkret warga, sehingga agama menjadi bahasa bersama yang membangkitkan kesadaran moral sekaligus kesadaran politik kolektif di tingkat lokal. |
| Perekat Solidaritas dan Keberanian Kolektif | Aktivis juga memaknai praktik keagamaan berjamaah sebagai medium pembentukan solidaritas sosial dan keberanian kolektif. Ritual keagamaan menciptakan ruang pertemuan yang memungkinkan warga berbagi rasa takut, pengalaman, dan harapan, sehingga mengurangi perasaan terisolasi dan menumbuhkan ikatan emosional antarsesama. Identitas keagamaan dibangun sebagai identitas kolektif yang menegaskan bahwa warga tidak berjuang sendiri, melainkan berada dalam satu barisan perjuangan yang dilandasi nilai-nilai keimanan, sehingga solidaritas dan keberanian menjadi fondasi utama gerakan menghadapi tekanan dari korporasi dan aparat. |
| Legitimasi Moral atas Aksi Penolakan | Dalam perspektif aktivis, agama memberikan legitimasi moral terhadap aksi penolakan pembangunan kandang ayam. Penolakan dipahami bukan sebagai tindakan melawan hukum atau anarkis, melainkan sebagai upaya membela nilai-nilai keadilan, perlindungan kehidupan, dan larangan merusak lingkungan yang diajarkan agama. Dengan pemaknaan ini, perjuangan warga memperoleh dasar etis yang membuat aksi penolakan terasa sah, bermakna, dan bermartabat, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa memperjuangkan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. |
| Konstruksi “kami” melawan “mereka” | Lebih jauh, aktivis memaknai agama sebagai alat simbolik untuk membangun batas identitas antara “kami” dan “mereka” dalam konflik pembangunan. “Kami” direpresentasikan sebagai komunitas warga beriman yang memperjuangkan hak hidup, lingkungan, dan nilai kemanusiaan, sementara “mereka” dimaknai sebagai korporasi dan aktor pendukungnya yang dianggap mengabaikan keadilan sosial dan merusak tatanan kehidupan. Dikotomi ini dibingkai dalam kerangka moral keagamaan, sehingga memperjelas posisi sosial-politik warga dan membentuk subjek kolektif perlawanan yang tidak hanya menentang secara material, tetapi juga secara moral dalam menghadapi relasi kuasa di tingkat lokal. |

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dalam gerakan penolakan pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus, para aktivis memaknai agama tidak sekadar sebagai praktik ibadah individual, melainkan sebagai kerangka etis dan politis untuk membaca ketidakadilan struktural yang dialami warga

(Howarth, 2000; Jørgensen & Phillips, 2002). Melalui pengajian, istighosah, dan doa bersama, persoalan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan ditafsirkan sebagai bentuk kezaliman terhadap hak hidup dan martabat manusia, bukan sekadar dampak teknis pembangunan. Aktivistik berperan menghubungkan ajaran keadilan, amanah, serta tanggung jawab manusia terhadap alam dengan pengalaman konkret warga, sehingga agama berfungsi sebagai bahasa bersama yang membangkitkan kesadaran moral sekaligus kesadaran politik kolektif (Hadiz, 2016). Dalam proses ini, praktik keagamaan berjamaah juga menjadi medium pembentukan solidaritas sosial karena menciptakan ruang pertemuan yang memungkinkan warga berbagi rasa takut, pengalaman, dan harapan, sekaligus mengurangi perasaan terisolasi dan menumbuhkan keberanian kolektif dalam menghadapi tekanan dari korporasi dan aparat (Bayat, 2013).

Selain membangkitkan kesadaran dan solidaritas, agama juga dimaknai aktivis sebagai sumber legitimasi moral atas aksi penolakan pembangunan kandang ayam. Penolakan dipahami bukan sebagai tindakan melawan hukum atau anarkis, melainkan sebagai upaya membela nilai-nilai keadilan, perlindungan kehidupan, dan larangan merusak lingkungan yang diajarkan agama, sehingga perjuangan warga memperoleh dasar etis yang sah dan bermartabat (Mouffe, 2013). Lebih jauh, agama berfungsi sebagai alat simbolik dalam membangun batas identitas antara “kami” dan “mereka” dalam konflik pembangunan, di mana “kami” direpresentasikan sebagai komunitas warga beriman yang memperjuangkan hak hidup dan lingkungan, sementara “mereka” dimaknai sebagai korporasi dan aktor pendukungnya yang dianggap mengabaikan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan. Dikotomi ini memperjelas posisi sosial-politik warga dan membentuk subjek kolektif perlawanan yang tidak hanya menentang secara material, tetapi juga secara moral dalam menghadapi relasi kuasa di tingkat lokal.

Selain membangkitkan kesadaran dan solidaritas, agama juga dimaknai aktivis sebagai sumber legitimasi moral atas aksi penolakan pembangunan kandang ayam. Penolakan dipahami bukan sebagai tindakan melawan hukum atau anarkis, melainkan sebagai upaya membela nilai-nilai keadilan, perlindungan kehidupan, dan larangan merusak lingkungan yang diajarkan agama, sehingga perjuangan warga memperoleh dasar etis yang sah dan bermartabat (DeHanas, 2016). Lebih jauh, agama berfungsi sebagai alat simbolik dalam membangun batas identitas antara “kami” dan “mereka” dalam konflik pembangunan, di mana “kami” direpresentasikan sebagai komunitas warga beriman yang memperjuangkan hak hidup dan lingkungan, sementara “mereka” dimaknai sebagai korporasi dan aktor pendukungnya yang dianggap mengabaikan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan. Dikotomi ini memperjelas posisi sosial-politik warga dan membentuk subjek kolektif perlawanan yang tidak hanya menentang secara material, tetapi juga secara moral dalam menghadapi relasi kuasa di tingkat lokal.

E. Politik Identitas dan Relasi Kekuasaan

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai rekonstruksi identitas keagamaan, antagonisme antara “kami” dan “mereka” dalam aksi gerakan penolakan kandang ayam di Cibetus tidak muncul secara alamiah atau spontan, melainkan terbentuk melalui proses kesadaran kolektif yang berlangsung secara bertahap dan dimediasi oleh praktik keagamaan (Aspinall, 2011; Hadiz, 2016). Para aktivis menjelaskan bahwa pengajian, istighosah, dan ceramah keagamaan menjadi ruang reflektif sekaligus politis, di mana warga mulai memahami pengalaman pencemaran, gangguan kesehatan, dan ketidakpastian hidup sebagai bagian dari ketidakadilan struktural (Burhani, 2017). Dalam ruang-ruang ini, “kami” dikonstruksikan sebagai masyarakat Cibetus yang memiliki hak moral untuk mempertahankan hidup, kesehatan, dan kelestarian lingkungan, sementara “mereka” direpresentasikan sebagai korporasi pemilik kandang ayam serta aktor-aktor negara yang dipersepsikan lebih berpihak pada kepentingan modal daripada kesejahteraan warga. Dikotomi ini diperkuat melalui penggunaan bahasa moral–religius seperti kezaliman, perampasan hak publik atas air dan tanah, serta larangan merusak ciptaan Tuhan, sehingga konflik pembangunan tidak lagi dipahami sebagai persoalan teknis atau administratif semata, tetapi sebagai persoalan etis dan eksistensial yang menyentuh nilai dasar kehidupan warga (Hefner, 2011; Madjid, 2008).

Dalam kesinambungan dengan fungsi agama sebagai sumber kesadaran moral dan solidaritas kolektif, identitas keagamaan juga dimanfaatkan secara strategis oleh aktivis sebagai medium negosiasi kekuasaan di tingkat lokal. Para aktivis menyadari bahwa dalam struktur sosial Cibetus, tokoh agama memiliki otoritas simbolik dan legitimasi sosial yang kuat, serta menjadi rujukan utama masyarakat dalam menilai benar–salah dan adil–tidaknya suatu persoalan (Burhani, 2017). Oleh karena itu, pendekatan keagamaan dipilih bukan semata karena kesesuaian kultural, tetapi juga sebagai strategi politik untuk memperkuat posisi tawar warga dalam menghadapi negara dan korporasi. Melalui ritual keagamaan yang dilakukan secara terbuka, bahkan di ruang-ruang publik seperti jalan atau depan kantor aparat, penolakan warga disampaikan dalam bingkai ibadah, doa, dan moralitas. Dengan cara ini, agama berfungsi sebagai bahasa yang relatif aman dan sulit direpresi, karena kritik terhadap relasi kuasa yang timpang disampaikan melalui simbol-simbol religius tanpa harus berhadapan secara frontal dengan aparat negara.

Relasi kuasa yang timpang antara masyarakat, negara, dan modal dalam konflik pembangunan kandang ayam semakin menegaskan posisi subordinat warga Cibetus. Negara, melalui mekanisme perizinan, kebijakan pembangunan, dan aparat penegak hukum, digambarkan lebih responsif terhadap kepentingan investasi dibandingkan terhadap keluhan warga mengenai pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan. Ketimpangan ini tampak dari keberlanjutan operasional kandang ayam meskipun

terdapat aduan berulang, hingga eskalasi konflik yang berujung pada kriminalisasi warga (Lesmana et al., 2020). Dalam situasi tersebut, masyarakat berada pada posisi rentan secara politik maupun hukum. Namun, dengan mengartikulasikan tuntutan melalui identitas keagamaan, warga dan aktivis berupaya menantang dominasi tersebut. Agama memungkinkan konflik dinaikkan dari ranah administratif dan teknokratis ke ranah keadilan sosial dan moral publik, sehingga relasi kuasa tidak sepenuhnya ditentukan oleh logika negara dan modal, tetapi juga dipersoalkan dalam kerangka etika dan legitimasi sosial.

Dalam keseluruhan dinamika tersebut, agama berfungsi sebagai sumber daya simbolik yang sangat penting dalam kontestasi lokal di Cibetus. Simbol-simbol keagamaan seperti doa bersama, selawat, istighosah, serta narasi tentang kezaliman, amanah, dan tanggung jawab manusia terhadap alam membangun makna bersama atas penderitaan warga sekaligus memperkuat legitimasi gerakan. Aktivis memanfaatkan agama untuk menyatukan isu lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial ke dalam satu tuntutan kolektif yang koheren dan mudah dipahami oleh warga dari berbagai latar belakang sosial (Lesmana et al., 2020). Dengan demikian, agama tidak hanya memperkuat identitas kolektif dan solidaritas internal, tetapi juga berperan sebagai alat produksi makna yang mampu menandingi wacana pembangunan negara dan logika ekonomi korporasi. Dalam konteks ini, kekuatan simbolik agama menjadi modal sosial-politik yang efektif bagi warga untuk mempertahankan ruang hidup dan menegosiasikan ulang posisi mereka dalam struktur kekuasaan lokal.

F. Agama, Lingkungan, dan Gerakan Sosial Lokal

Sejalan Sejalan dengan pembahasan sebelumnya mengenai rekonstruksi identitas keagamaan, antagonisme antara “kami” dan “mereka” dalam gerakan penolakan kandang ayam di Cibetus terbentuk melalui proses penyadaran kolektif yang dimediasi oleh praktik keagamaan. Para aktivis menjelaskan bahwa pengajian, istighosah, dan ceramah keagamaan menjadi ruang reflektif di mana warga tidak hanya berkumpul secara fisik, tetapi juga bersama-sama menafsirkan pengalaman ketidakadilan yang mereka alami (Burhani, 2017). Melalui ruang tersebut, warga mulai memahami posisi sosial mereka sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh pembangunan dan mengalami peminggiran dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini, “kami” dimaknai sebagai komunitas warga beriman yang memperjuangkan hak hidup, kesehatan, dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral, sementara “mereka” direpresentasikan sebagai korporasi pemilik kandang ayam serta aktor-aktor negara yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan modal. Dikotomi tersebut diperkuat melalui penggunaan bahasa moral-religius seperti kezaliman, hak publik atas air dan tanah, serta larangan merusak ciptaan Tuhan, sehingga konflik pembangunan tidak lagi dipahami sebagai persoalan teknis atau administratif semata, melainkan sebagai persoalan etis dan eksistensial yang menyangkut martabat manusia

dan relasi manusia dengan alam. Berikut ini dokumentasi pada saat aksi demonstrasi dan ishtigosah serta buka puasa bersama pada saat bulan ramadhan:



Gambar 3 Aksi Jilid 2 Masyarakat Cibetus

Sumber: Dokumentasi Lapnagan LPM Orange 2025

Pada saat dahaga dan lapar justru menjadi satu kekuatan untuk bersuara. Dalam kesinambungan dengan fungsi agama sebagai sumber kesadaran moral dan solidaritas, identitas keagamaan juga dimanfaatkan sebagai medium negosiasi kekuasaan di tingkat lokal (Mayrudin et al., 2020). Aktivist menyadari bahwa dalam struktur sosial Cibetus, tokoh agama dan simbol-simbol keagamaan memiliki legitimasi sosial yang kuat serta dipercaya oleh masyarakat lintas generasi. Oleh karena itu, pendekatan keagamaan dipilih secara sadar sebagai strategi untuk memperkuat posisi tawar warga dalam menghadapi negara dan korporasi, terutama ketika jalur formal dianggap tidak responsif. Melalui ritual keagamaan yang dilakukan secara terbuka, bahkan di ruang-ruang publik seperti jalan desa atau depan kantor aparat, penolakan warga disampaikan dalam bingkai ibadah dan moralitas. Cara ini membuat aksi penolakan sulit direpresi secara langsung karena dibingkai sebagai ekspresi keimanan dan nilai luhur, bukan sekadar protes politik. Dalam hal ini, agama berfungsi sebagai bahasa yang relatif aman sekaligus bermakna untuk menyampaikan kritik terhadap relasi kuasa yang timpang tanpa harus berhadapan secara frontal dengan aparat negara.

Konflik pembangunan kandang ayam, terlihat adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara masyarakat, negara, dan modal (Bebbington et al., 2018). Negara, melalui mekanisme perizinan, kebijakan pembangunan, dan aparat penegak hukum, digambarkan cenderung lebih responsif terhadap kepentingan investasi dibandingkan terhadap keluhan warga terkait pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana logika pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan suara masyarakat lokal yang terdampak langsung. Situasi tersebut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat, terutama ketika konflik berujung

pada intimidasi atau kriminalisasi warga yang menolak pembangunan. Namun, dengan mengartikulasikan tuntutan melalui identitas keagamaan, warga dan aktivis berupaya menantang dominasi tersebut. Agama memungkinkan konflik dinaikkan dari ranah administratif dan teknokratis ke ranah keadilan sosial dan moral publik, sehingga relasi kuasa tidak sepenuhnya ditentukan oleh negara dan modal, tetapi juga dipertarungkan di tingkat makna dan legitimasi sosial.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa agama berperan secara aktif dan dinamis dalam membentuk cara warga dan aktivis memahami, merespons, serta mengorganisasi perlawanan terhadap pembangunan kandang ayam di Cibetus. Identitas keagamaan tidak hanya menjadi sumber makna spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka etis, bahasa politik, dan sumber daya simbolik yang menghubungkan pengalaman ekologis, kesehatan, dan ketidakadilan struktural ke dalam satu narasi kolektif. Melalui praktik keagamaan, warga membangun kesadaran moral, solidaritas, legitimasi, serta posisi tawar dalam relasi kuasa yang timpang dengan negara dan korporasi. Dengan demikian, dinamika gerakan penolakan di Cibetus tidak dapat dipahami semata sebagai konflik lingkungan atau kebijakan pembangunan, melainkan sebagai proses sosial-politik yang dimediasi oleh pemaknaan keagamaan yang kontekstual dan terus dinegosiasikan di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gerakan penolakan pembangunan kandang ayam di Desa Cibetus, Kecamatan Padarincang, merupakan proses sosial-politik yang dimediasi secara kuat oleh mobilisasi dan pemaknaan ulang identitas keagamaan. Gerakan ini tidak semata-mata lahir sebagai respons terhadap dampak lingkungan dan kesehatan, tetapi berkembang melalui proses penyadaran kolektif yang berlangsung dalam praktik-praktik keagamaan. Identitas keagamaan direkonstruksi oleh aktivis sebagai sumber nilai dan legitimasi moral untuk mengartikulasikan ketidakadilan struktural, membangun solidaritas warga, serta memperjelas batas identitas antara “kami” sebagai komunitas warga beriman yang memperjuangkan hak hidup dan kelestarian lingkungan dengan “mereka” sebagai representasi negara dan korporasi yang dipersepsikan mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan. Melalui pengajian, istighosah, dan doa bersama, pengalaman penderitaan material warga ditransformasikan menjadi kesadaran moral dan politik yang mendorong keberanian kolektif dalam menghadapi relasi kuasa yang timpang.

Dengan menggunakan kerangka teori wacana Laclau dan Mouffe serta pendekatan fenomenologis, penelitian ini menunjukkan bahwa agama dalam konteks gerakan sosial lokal bukanlah entitas statis atau sekadar simbol kultural, melainkan sumber daya diskursif yang dinamis, kontingen, dan strategis. Agama berfungsi sebagai

kerangka etis, bahasa politik, dan modal simbolik yang memungkinkan warga menantang dominasi wacana pembangunan yang berorientasi pada kepentingan modal, sekaligus menegosiasikan ulang posisi mereka dalam struktur kekuasaan lokal. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian politik identitas dan gerakan sosial dengan menegaskan bahwa identitas keagamaan dapat berperan progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis, serta memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat lokal.

Referensi

- Asad, T. (1993). *Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam*. Johns Hopkins University Press.
- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(3), 76–90. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0042>
- BantenInside. (2024). *Warga Cibetus Tetap Melawan, Gugat Izin Lingkungan Peternakan Ayam PT Sinar Ternak Sejahtera ke PTUN*. <https://www.banteninside.co.id>
- BantenRaya. (2024). *Trauma Mendalam dengan Kandang Ayam, Warga Cibetus Minta Izin Operasional PT STS Dicabut*. <https://www.bantenraya.com>
- Bayat, A. (2013). *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East* (2nd ed.). Stanford University Press.
- Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2018). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. *World Development*, 103, 35–47.
- Burhani, A. N. (2017). *Islam Dinamika dan Politik di Indonesia*. PT Gramedia.
- Castells, M. (1997). The Power of Identity. *Information, Communication & Society*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13691189809358928>
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- DeHanas, D. N. (2016). Religious activism and the politics of urban space. *Journal of Contemporary Religion*, 31(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/13537903.2015.1109876>
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Routledge.

- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Gramedia.
- Fox, J. (2018). An Introduction to Religion and Politics: Theory and Practice. *Politics and Religion*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.1017/S1755048317000635>
- Glynos, J., & Howarth, D. (2007). *Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory*. Routledge.
- Hadiz, V. R. (2016). Islamic populism in Indonesia and the Middle East. *Cambridge Journal of International Affairs*, 29(2), 521–540. <https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1167849>
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hirschkind, C. (2001). The Ethics of Listening: Cassette-Sermon Audition in Contemporary Egypt. *American Ethnologist*, 28(3), 623–649. <https://doi.org/10.1525/ae.2001.28.3.623>
- Howarth, D. (2000). *Discourse*. Open University Press.
- Howarth, D., & Stavrakakis, Y. (2000). Introducing Discourse Theory and Political Analysis. In D. Howarth, A. J. Norval, & Y. Stavrakakis (Eds.), *Discourse Theory and Political Analysis* (pp. 1–23). Manchester University Press.
- Jasper, J. M. (1997). *The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements*. University of Chicago Press.
- Jørgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. Sage Publications.
- Kompas.com. (2025). *Bakar Kandang Ayam di Padarincang, Sejumlah Warga Serang Ditangkap Polisi*. <https://regional.kompas.com>
- Laclau, E. (2005). *On Populist Reason*. Verso.
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Verso.
- Lesmana, R., Rahman, A., & Permana, D. (2020). Konflik pembangunan peternakan ayam di Kecamatan Gunung Kencana. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 24(2), 145–158.
- Li, T. M. (2012). *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Duke University Press.
- Madjid, N. (2008). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Mahmood, S. (2005). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Mayrudin, Y. M., Husna, N. A., & Yuliati, F. R. (2020). *Journal of Political Issues Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian*. 2, 1–9.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*.

- Cambridge University Press.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 40(1), 58–84. <https://doi.org/10.1355/cs40-1d>
- Mouffe, C. (2013). *Agonistics: Thinking the World Politically*. Verso.
- Nepstad, S. E. (2004). Religion, Violence, and Peacemaking. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 43(2), 191–204.
- Smith, A. (2010). *Social Movements and Political Change*. Polity Press.
- Smith, A., & Maarif, S. (2024). How Social Movements Use Religious Creativity to Address Environmental Crises in Indonesian Local Communities. *Journal of Social Movement Studies*.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197–217.
- SuaraBanten.id. (2025). *Kasus Pembakaran Kandang Ayam di Padarincang Berujung Penahanan Warga*. <https://banten.suara.com>
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768--2004*. Paradigm Publishers.
- Torring, J. (1999). *New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Žižek*. Blackwell Publishers.
- Wahyuni, S., & Santoso, B. (2023). Dampak lingkungan dan keberlanjutan peternakan ayam ras pedaging pola kemitraan. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 7(1), 45–60.